

RINGKASAN

Penyusunan Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan Isu Strategis Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan merupakan tugas dan fungsi dari Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai *leading sector* dalam perencanaan pembangunan daerah. Sejak lahirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja merupakan pedoman untuk penyusunan Penjenjangan Kinerja. Terdapat kurangnya kepatuhan terhadap Permenpan RB No. 89 Tahun 2021 dalam proses penyusunan Penjenjangan Kinerja pada tahun 2023 saat penyusunan Dokumen RPD 2024-2026. Sebagai alat bantu organisasi dalam penyusunan Penjenjangan Kinerja untuk mengawal struktur logika sebab-akibat dari berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan maka menggunakan Pohon Kinerja. Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki beberapa isu strategis yang harus diatasi, salah satunya adalah Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses, tantangan, serta kendala pada implementasi penjenjangan kinerja dalam Isu Strategis Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan. Lalu keterkaitan penjenjangan kinerja terhadap isu strategis optimalisasi tata kelola pemerintahan, kemudian apakah penyusunan penjenjangan kinerja sudah sesuai dengan aturan yang ada serta bagaimana upaya perbaikan agar dapat berjalan dengan optimal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) sebagai OPD perencanaan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknis *purposive sampling*. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan terkait Penjenjangan Kinerja. Validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik Triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek kepatuhan dalam implementasi penyusunan Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang disusun pada tahun 2023 menunjukkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan menunjukkan hasil “Baik” tetapi dalam penyusunannya masih terdapat kekurangan yaitu kurangnya tahapan penyusunan Penjenjangan Kinerja yaitu tidak menerapkan Critical Success Factor (CSF) sebagai mana yang seharusnya terdapat 5 tahapan dalam Permenpan RB No.89 Tahun 2021, artinya belum terdapat kepatuhan terhadap pedoman. Pada aspek lancarnya rutinitas fungsi dan dampak yang dikehendaki sudah menunjukkan hasil yang optimal.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Publik, Penjenjangan Kinerja

SUMMARY

Preparing Banyumas Regency Government Performance Rankings based on Strategic Issues of Optimizing Government Governance is the task and function of the Planning, Regional Development, Research and Development Agency as the leading sector in regional development planning. Since the birth of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Regulation of the Republic of Indonesia Number 89 of 2021 concerning Performance Leveling, it has been a guideline for preparing Performance Leveling. There is a lack of compliance with Permenpan RB No. 89 of 2021 in the process of preparing Performance Grading in 2023 when preparing the 2024-2026 RPD Document. As a tool to help organizations in preparing Performance Tiering to monitor the cause-and-effect logic structure of the various conditions needed by the organization to produce the desired outcomes, the Performance Tree is used. The Banyumas Regency Government has several strategic issues that must be addressed, one of which is Optimizing Government Governance.

The purpose of this study is to determine and analyze the process, challenges, and obstacles in the implementation of performance grading in the Strategic Issue of Optimizing Governance. Then the relationship between performance grading and the strategic issue of optimizing governance, then whether the preparation of performance grading is in accordance with existing regulations and how to improve it so that it can run optimally at the Regional Development Planning Agency, Research and Development (Bappedalitbang) as the OPD planning of the Banyumas Regency Government. In this research, the author used a qualitative approach with purposive sampling technique. The data sources used are primary data obtained through interviews, observation and documentation, as well as secondary data sources obtained from reports and journals related to discussions related to Performance Grading. Validity and reliability in this research use source triangulation techniques.

The results of this study indicate that in terms of compliance in the implementation of the preparation of the Banyumas Regency Government Performance Leveling for the 2024-2026 Regional Development Plan (RPD) prepared in 2023, the Government Agency Performance Accountability System Evaluation Results Report showed "Good" results, but in its preparation there were still shortcomings, namely the lack of stages in the preparation of the Performance Leveling, namely not implementing the Critical Success Factor (CSF) as there should be 5 stages in Permenpan RB No. 89 of 2021, meaning that there is no compliance with the guidelines. In terms of the smooth functioning routine and the desired impact, it has shown optimal results.

Keywords: Implementation of Public Policy, Performance Leveling